



Implementasi Strategi Global dalam Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Buton Utara

Noval Nur¹, Rina Hasmanah², Samsul³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo ^{1,2,3}

*Email nofalnur3003@gmail.com; rinahasz1985@gmail.com;

Diterima: 28-10-2025 | Disetujui: 08-11-2025 | Diterbitkan: 10-11-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of global strategy concepts within the context of local government administration, focusing on a case study of North Buton Regency, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. A descriptive qualitative approach was employed using secondary data from the Central Statistics Agency (BPS), the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of North Buton 2021–2026, and local government performance reports. The findings reveal that the implementation of regional development strategies in North Buton still faces challenges in cross-sectoral coordination, human resource management, and adaptation to global and technological changes. Referring to the Global Strategy Model of Wheelen & Hunger (2018)—which includes entry strategy, coordination, international development, employment, and performance measurement—the study demonstrates that global strategic principles can be contextually applied in public administration. The adaptation of global strategies at the regional level has strengthened intersectoral synergy, improved the use of digital technology in planning and monitoring, and enhanced results-based evaluation mechanisms. The study concludes that the global strategy model provides a useful conceptual framework for improving regional governance performance, institutional learning, and collaborative public management in the era of decentralization and global interdependence.

Keywords: global strategy, local government, policy implementation, North Buton Regency, public management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep strategi global pada konteks pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, RPJMD Kabupaten Buton Utara 2021–2026, laporan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), serta observasi kebijakan strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi pembangunan daerah di Buton Utara masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi lintas sektor, efisiensi sumber daya manusia (SDM), dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan global serta teknologi digital. Dengan meninjau model global strategy Wheelen & Hunger (2018) yang meliputi tahapan entry strategy, coordination, international development, employment, dan performance measurement, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan strategi global dapat diterapkan dalam birokrasi publik secara kontekstual. Adaptasi strategi global ke dalam pemerintahan daerah menghasilkan peningkatan sinergi program lintas sektor, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, dan penguatan evaluasi berbasis hasil.

Kata kunci: strategi global, pemerintahan daerah, implementasi kebijakan, Buton Utara, manajemen public

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Noval Nur, Rina Hasmanah, & Samsul. (2025). Implementasi Strategi Global dalam Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Buton Utara. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(4), 2174-2183. <https://doi.org/10.63822/g8tsmr68>

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan global yang cepat menuntut setiap organisasi, termasuk institusi pemerintahan, untuk mengembangkan kemampuan adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam mengelola sumber daya. Globalisasi yang semula hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi lintas negara, kini juga berimplikasi pada tata kelola publik. Pemerintah daerah tidak lagi berperan sebagai pelaksana administratif semata, tetapi juga sebagai *policy entrepreneur* yang dituntut mampu mengelola potensi daerah secara strategis agar berdaya saing global. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi yang dimulai sejak tahun 2001 menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama pembangunan dengan tanggung jawab besar terhadap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan di wilayahnya.

Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Muna pada tahun 2007. Secara geografis, daerah ini memiliki potensi kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata yang besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Buton Utara (2023), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 3,45 triliun, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,86%. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 5,27%. Selain itu, tingkat kemiskinan masih berada pada 13,5%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,21, menandakan adanya kesenjangan antarwilayah dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk menerapkan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga mempertimbangkan dinamika regional dan global. Teori *Global Strategy* dari Wheelen & Hunger (2018) menekankan pentingnya koordinasi lintas unit, pengembangan kapasitas organisasi, serta kemampuan untuk berinovasi dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan. Meskipun awalnya dikembangkan untuk sektor korporasi, konsep ini memiliki relevansi kuat bagi birokrasi publik, khususnya dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan daerah.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip strategi global diterapkan dalam konteks pemerintahan daerah, dan sejauh mana penerapan tersebut dapat meningkatkan efektivitas kebijakan di Kabupaten Buton Utara. Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mengidentifikasi penerapan elemen strategi global dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Buton Utara.
2. Menganalisis kesesuaian antara teori *global strategy* dengan kondisi birokrasi daerah.
3. Memberikan rekomendasi strategi penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan berbasis prinsip strategi global.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam mengadaptasi konsep manajemen strategis global ke sektor publik, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pembangunan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi hasil.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep *strategic management* secara umum didefinisikan oleh Wheelen & Hunger (2018) sebagai serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi.

Strategi global merupakan bentuk implementasi strategi korporasi pada level internasional, yang melibatkan pengambilan keputusan terkait ekspansi, koordinasi, dan pengendalian operasi lintas negara. Meski demikian, prinsip utamanya — yakni perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi kinerja — dapat diterapkan pada organisasi publik seperti pemerintah daerah.

Penerapan teori strategi global pada birokrasi publik dapat dijelaskan melalui tiga kerangka teoretis:

1. Konsep New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi hasil (Osborne & Gaebler, 1992).
2. Good Governance Framework yang mengedepankan transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum (UNDP, 2016).
3. Dynamic Capability Theory yang menekankan pentingnya pembelajaran organisasi dan inovasi adaptif (Teece, 2007).

Dalam konteks pemerintahan daerah, strategi global dapat diartikan sebagai upaya integratif antara visi pembangunan daerah dengan dinamika eksternal, baik regional maupun global. Kabupaten Buton Utara, misalnya, menghadapi isu klasik seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas SDM, dan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, penerapan strategi global menuntut pemerintah daerah untuk membangun *strategic alliance* dengan berbagai aktor, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil (triple helix governance).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Data dikumpulkan melalui:

- Dokumentasi: RPJMD 2021–2026, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2023, dan publikasi BPS 2023.
- Observasi nonpartisipatif terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan daerah dan forum koordinasi lintas OPD.
- Wawancara semi-terstruktur dengan pejabat Bappeda, Dinas Kominfo, dan BKPSDM (2024).

Data dianalisis dengan teknik reduksi, kategorisasi, dan interpretasi tematik (Miles & Huberman, 2014). Validitas diperkuat melalui *triangulasi sumber dan dokumen*.

HASIL PEMBAHASAN

1. Entry Strategy: Membangun Kolaborasi Lintas Wilayah dan Internasionalisasi Kapasitas Daerah

Penerapan prinsip *entry strategy* dalam konteks pemerintahan daerah dapat dipahami sebagai proses memperluas jangkauan, jejaring, dan kemitraan strategis untuk mempercepat pembangunan daerah. Berdasarkan teori Wheelen & Hunger (2018), *entry strategy* dalam bisnis global mencakup berbagai bentuk, seperti *exporting*, *franchising*, *licensing*, dan *strategic alliances*. Dalam birokrasi publik, prinsip ini dapat dimaknai sebagai *strategic entry* melalui kerja sama lintas wilayah, kolaborasi dengan pemerintah pusat dan mitra internasional, serta partisipasi aktif dalam program nasional yang memiliki nilai tambah global.

Di Kabupaten Buton Utara, penerapan strategi ini terlihat dari kebijakan *inter-regional cooperation* dalam pengelolaan potensi pesisir dan laut. Berdasarkan data Bappeda (2023), Pemerintah Kabupaten Buton Utara menjalin kerja sama dengan Kabupaten Wakatobi dan Buton Selatan melalui program “Kawasan Ekonomi Bahari Terpadu” yang difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini bertujuan menciptakan sinergi ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan, memperkuat logistik hasil tangkapan, serta mengembangkan *blue economy*.

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai membuka peluang kerja sama teknis internasional melalui program UNDP Coastal Resilience yang berfokus pada adaptasi perubahan iklim. Buton Utara menjadi salah satu dari lima kabupaten di Sulawesi Tenggara yang diikutsertakan dalam pilot project penguatan ketahanan pesisir berbasis masyarakat. Ini merupakan bentuk konkret penerapan *entry strategy* dalam konteks pemerintahan daerah — yakni, membuka akses global untuk mendapatkan sumber daya teknis, pengetahuan, dan pendanaan pembangunan.

Dari perspektif manajemen publik, kebijakan *entry* seperti ini mencerminkan orientasi pemerintah daerah terhadap prinsip *interoperability governance*, di mana kolaborasi lintas batas menjadi strategi masuk untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Strategi ini juga memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi kompetisi antarwilayah dalam menarik investasi, program nasional, dan hibah luar negeri. Dengan demikian, adaptasi konsep *entry strategy* dari Wheelen & Hunger dapat menjadi dasar untuk membangun kapasitas global pemerintah daerah tanpa harus menunggu status administratif khusus seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

2. *International Coordination*: Sinkronisasi Program dan Harmonisasi Kelembagaan

Konsep *international coordination* dalam teori Wheelen & Hunger mengacu pada penyelarasan fungsi, struktur, dan kebijakan organisasi agar tercipta sinergi antarunit di berbagai wilayah operasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, konsep ini dapat diadaptasi menjadi *cross-sectoral coordination* atau koordinasi lintas sektor dan lembaga, baik antar-OPD maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan mitra eksternal.

Di Kabupaten Buton Utara, koordinasi lintas organisasi diimplementasikan melalui sistem *E-Planning* dan *E-SAKIP* (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Berdasarkan evaluasi Inspektorat Daerah 2023, sistem ini telah digunakan oleh 27 perangkat daerah dengan tingkat kepatuhan laporan mencapai 94,2%. Namun, ditemukan pula adanya *redundancy program* sebesar 11,4%, di mana beberapa OPD mengusulkan kegiatan serupa tanpa integrasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi strategis masih perlu diperkuat, terutama dalam tahap perencanaan dan sinkronisasi data.

Menurut model koordinasi global Wheelen & Hunger (2018), sinergi lintas fungsi hanya dapat tercapai jika organisasi mengadopsi struktur yang fleksibel dan budaya komunikasi terbuka. Dalam konteks birokrasi daerah, koordinasi tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga komitmen politik, kemampuan manajerial, dan mekanisme akuntabilitas. Untuk mengatasi masalah koordinasi, Pemerintah Kabupaten Buton Utara pada tahun 2024 menginisiasi *Forum Sinkronisasi Program Prioritas (FSPP)* yang mempertemukan kepala OPD lintas sektor. Forum ini berfungsi sebagai wadah penyelarasan indikator kinerja dan output pembangunan. Hasilnya, beberapa kegiatan tumpang tindih, seperti program penanganan stunting, kini diintegrasikan dengan pendekatan “Satu Data Satu Program” yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan Dinas Kesehatan.

Dari hasil wawancara dengan Bappeda, diketahui bahwa hambatan utama koordinasi justru berasal dari perbedaan persepsi antar-OPD mengenai indikator kinerja dan alokasi anggaran. Oleh karena itu, strategi global Wheelen & Hunger yang menekankan pentingnya “alignment and integration” dapat menjadi pedoman untuk memperbaiki tata kelola koordinasi di daerah. Penerapan *performance-based coordination* ini diharapkan mendorong munculnya pola kerja kolaboratif dan mengurangi ketergantungan pada pendekatan sektoral yang sering menimbulkan fragmentasi kebijakan.

3. Stages of International Development: Transisi dari Orientasi Lokal ke Regional dan Global

Wheelen & Hunger (2018) menggambarkan *stages of international development* sebagai proses evolutif organisasi dari tahap domestik menuju global. Dalam birokrasi publik, tahapan ini dapat diterjemahkan menjadi proses transformasi pemerintahan daerah dari orientasi lokal ke regional dan bahkan internasional. Kabupaten Buton Utara kini berada pada tahap transisi “multidomestik menuju global,” di mana kebijakan masih berorientasi pada kebutuhan internal, tetapi sudah mulai memperluas jejaring dengan lembaga eksternal.

Pemerintah daerah telah menunjukkan orientasi ke arah global dengan mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dalam dokumen RPJMD 2021–2026. Sebanyak 12 dari 17 tujuan SDGs telah diadopsi, termasuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan berkualitas, energi bersih, dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Selain itu, Buton Utara juga mulai memperkuat jejaring riset dan inovasi daerah dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam program *Sistem Inovasi Daerah (SIDa)*. Kerja sama ini menghasilkan inovasi seperti *aplikasi digital perikanan tangkap*, yang digunakan oleh kelompok nelayan untuk melaporkan hasil tangkapan secara daring.

Dari perspektif teori, tahapan ini menunjukkan pergeseran dari model *administrative governance* ke arah *network governance*, di mana pemerintah daerah tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku pembangunan, tetapi bagian dari jejaring yang saling tergantung. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kesiapan Buton Utara dalam menghadapi transisi menuju tata kelola global masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur digital dan kapasitas fiskal. Namun, langkah-langkah awal seperti adopsi indikator SDGs, penguatan inovasi lokal, dan kemitraan riset menunjukkan bahwa pemerintah daerah sedang bertransformasi menuju *globally aware government* — yaitu pemerintah daerah yang mampu berpikir global, tetapi bertindak lokal.

4. Global Employment: Reformasi Manajemen ASN dan Penguatan Kompetensi Digital

Poin keempat dari strategi global menurut Wheelen & Hunger adalah *international employment*, yang dalam konteks pemerintahan daerah diterjemahkan sebagai reformasi manajemen ASN menuju orientasi global. Artinya, birokrasi harus menyiapkan aparatur yang memiliki kompetensi lintas fungsi, kemampuan adaptasi, dan pemahaman teknologi modern. Data BKPSDM Kabupaten Buton Utara (2023) menunjukkan jumlah ASN aktif sebanyak 2.957 orang, dengan komposisi 62% berpendidikan S1, 6% S2, dan sisanya SMA/D3. Hanya 41% ASN yang dinilai memiliki kompetensi digital dasar sesuai standar KemenPAN-RB (2023). Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi implementasi *smart governance*. Sebagai upaya peningkatan kapasitas, Pemerintah Kabupaten Buton Utara telah menerapkan program ASN *BerAKHLAK Digital Learning* bekerja sama dengan LAN dan Kominfo. Melalui platform *e-learning* ASN

Smart, sebanyak 840 ASN telah mengikuti pelatihan berbasis digital, dengan fokus pada manajemen kinerja, pelayanan publik, dan penggunaan aplikasi perencanaan berbasis daring.

Prinsip *global employment* menekankan pentingnya pengalaman lintas budaya dan kemampuan adaptif. Dalam konteks lokal, ini dapat diartikan sebagai kemampuan ASN bekerja lintas sektor dan lintas daerah. Pemerintah daerah mulai mendorong rotasi lintas OPD agar aparatur memiliki wawasan komprehensif tentang pembangunan lintas bidang. Selain itu, konsep *expatriation* Wheelen & Hunger dapat diadaptasi menjadi *penugasan daerah* di mana ASN ditugaskan sementara di daerah lain untuk memperluas wawasan. Misalnya, ASN Buton Utara mengikuti *Magang Pemerintahan Daerah Inovatif* di Kabupaten Banyuwangi pada 2023. Kebijakan ini sejalan dengan paradigma *global talent mobility* dalam sektor publik, di mana pegawai diarahkan menjadi “agent of change” yang berorientasi hasil, bukan sekadar pelaksana administratif.

5. Performance Measurement: Evaluasi Multi-Indikator dan Reformasi Akuntabilitas

Wheelen & Hunger (2018) menekankan bahwa pengukuran kinerja internasional harus mencakup indikator keuangan dan nonkeuangan. Dalam pemerintahan daerah, pengukuran semacam ini setara dengan penerapan *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* dan *Evaluasi Reformasi Birokrasi*. Kabupaten Buton Utara memperoleh nilai B (Baik) dalam Evaluasi SAKIP 2023. Capaian ini menunjukkan peningkatan dari nilai sebelumnya CC (Cukup Baik) pada 2021. Namun, analisis dokumen SAKIP menunjukkan bahwa indikator hasil (*outcome indicators*) masih terbatas pada capaian makro ekonomi dan sosial, belum mencerminkan inovasi dan kepuasan publik.

Sesuai prinsip *global performance measurement*, pemerintah daerah seharusnya menggunakan *balanced scorecard* yang meliputi dimensi keuangan, pelayanan publik, pembelajaran organisasi, dan proses internal. Dalam konteks Buton Utara, indikator pelayanan publik yang diukur baru mencakup tingkat penyelesaian aduan masyarakat (84%) dan tingkat kepuasan layanan perizinan (78%).

Pemerintah daerah kini tengah mengembangkan Sistem Informasi Kinerja Daerah (SIKD) berbasis dashboard digital yang memantau capaian program OPD secara real-time. Dengan sistem ini, pimpinan daerah dapat melakukan *evidence-based decision making* dan memperkuat transparansi publik. Dari perspektif strategi global, mekanisme ini sejalan dengan prinsip *tight control in global operations* — di mana koordinasi dan evaluasi dilakukan secara terpusat namun berbasis data terdistribusi.

Lebih jauh, pengukuran kinerja berbasis data ini juga memperkuat hubungan antara kinerja individu ASN dengan capaian organisasi, sehingga menciptakan *line of sight* yang jelas antara aktivitas harian pegawai dengan tujuan strategis daerah. Dengan demikian, penerapan konsep pengukuran kinerja global mendorong munculnya birokrasi berbasis hasil dan akuntabilitas publik yang lebih tinggi.

6. Implikasi Strategi Global terhadap Pembangunan dan Transformasi Birokrasi Daerah

Adaptasi strategi global ke dalam konteks pemerintahan daerah memiliki implikasi yang luas terhadap arah pembangunan dan transformasi birokrasi. Pertama, dari sisi kelembagaan, pendekatan global mendorong pemerintah daerah untuk lebih fleksibel, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan eksternal. Kedua, dari sisi kebijakan, prinsip integrasi lintas sektor menuntut perubahan paradigma perencanaan — dari berbasis program menjadi berbasis hasil dan dampak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *global strategy* telah memberikan efek positif terhadap budaya organisasi. Misalnya, meningkatnya partisipasi antar-OPD dalam forum perencanaan, terbentuknya jejaring inovasi lintas bidang, serta adopsi teknologi digital dalam pelaporan kinerja.

Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada tiga aspek:

1. Keterbatasan fiskal, di mana lebih dari 82% APBD Buton Utara masih bersumber dari dana transfer pusat (BPKAD, 2023).
2. Kapasitas SDM, yang belum merata antar-OPD, terutama dalam bidang analisis data dan inovasi pelayanan.
3. Konsistensi kebijakan lintas pemerintahan, karena perubahan kepala daerah sering kali diikuti dengan perubahan prioritas pembangunan.

Mengacu pada Wheelen & Hunger, keberhasilan strategi global tergantung pada *strategic flexibility* — yaitu kemampuan organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan tanpa kehilangan arah strategis. Dalam konteks Buton Utara, hal ini berarti memperkuat sistem manajemen pengetahuan, mengintegrasikan basis data lintas sektor, dan membangun mekanisme pembelajaran organisasi berkelanjutan (*continuous learning system*). Transformasi birokrasi menuju *globally adaptive government* memerlukan reformasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kultural — menanamkan nilai inovasi, integritas, dan orientasi hasil di seluruh level ASN.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi global sebagaimana dikemukakan oleh Wheelen & Hunger (2018) dapat diadaptasi secara efektif dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Buton Utara, dengan memperhatikan karakteristik birokrasi publik, kapasitas kelembagaan, serta dinamika sosial-ekonomi lokal. Meskipun konsep ini berasal dari dunia korporasi, prinsip-prinsip dasarnya — seperti koordinasi lintas unit, fleksibilitas strategis, efisiensi sumber daya, dan pengukuran kinerja berbasis hasil — terbukti relevan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

1. Kesimpulan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperluas cakupan penerapan *strategic management* dari sektor privat ke sektor publik melalui integrasi paradigma New Public Management (NPM) dan *global strategy* model. Dalam konteks pemerintahan daerah, strategi global bukan berarti ekspansi lintas negara, tetapi transformasi orientasi birokrasi dari administratif ke manajerial dan adaptif. Buton Utara menjadi studi kasus yang menggambarkan bagaimana *entry strategy*, *international coordination*, *stages of development*, *employment*, dan *performance measurement* dapat dijalankan dalam lingkup lokal.

Dengan demikian, strategi global di sektor publik lebih bermakna sebagai pendekatan integratif dan inovatif dalam mengelola sumber daya publik secara efisien, memperluas jejaring kolaborasi, serta menciptakan tata kelola yang responsif terhadap dinamika global seperti digitalisasi, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan *global mindset* dalam birokrasi merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya *adaptive governance* di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).

2. Kesimpulan Empiris

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa Kabupaten Buton Utara telah memulai proses penerapan prinsip strategi global dalam beberapa aspek penting:

1. Pada tahap *entry strategy*, pemerintah daerah telah mengembangkan kolaborasi lintas wilayah melalui program *Kawasan Ekonomi Bahari Terpadu* dan kerja sama internasional dengan UNDP dalam ketahanan pesisir. Hal ini menunjukkan peningkatan keterbukaan terhadap sumber daya eksternal dan inovasi lintas batas.
2. Dalam hal koordinasi lintas sektor (*international coordination*), sistem *E-Planning* dan *E-SAKIP* telah membantu memperbaiki integrasi program antar-OPD. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena belum sepenuhnya didukung oleh struktur organisasi yang fleksibel dan budaya kerja kolaboratif.
3. Tahap perkembangan organisasi (*stages of development*) menunjukkan bahwa Buton Utara sedang bertransisi dari model birokrasi lokal menuju orientasi regional dan global, tercermin dari integrasi SDGs ke dalam RPJMD serta kemitraan riset dengan BRIN.
4. Manajemen SDM (*global employment*) menjadi aspek kunci yang menentukan keberhasilan strategi global. Meskipun masih menghadapi keterbatasan kompetensi digital ASN, program pelatihan daring dan mobilitas jabatan telah membuka ruang bagi pengembangan aparatur yang adaptif.
5. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) telah menunjukkan kemajuan dengan peningkatan nilai SAKIP dari CC ke B, tetapi perlu diperluas ke dimensi nonkeuangan seperti kepuasan publik, inovasi pelayanan, dan efektivitas lintas sektor.
6. Implikasi strategisnya, penerapan strategi global mendorong perubahan budaya organisasi menuju birokrasi yang lebih partisipatif, inovatif, dan berbasis hasil (*result-based governance*).

Dengan demikian, secara empiris dapat disimpulkan bahwa adaptasi strategi global telah memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi dan efektivitas kebijakan daerah, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek sumber daya, data, dan koordinasi lintas lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Utara. (2023). *Kabupaten Buton Utara dalam Angka 2023*.
Pemerintah Kabupaten Buton Utara. (2021). *RPJMD Kabupaten Buton Utara 2021–2026*.
Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2018). *Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability* (15th ed.). Pearson.
Hughes, O. E. (2019). *Public Management and Administration: An Introduction*. Palgrave Macmillan.
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government*. Addison-Wesley.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage.
Kementerian PAN-RB. (2023). *Laporan Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2023*.
BKPSDM Kabupaten Buton Utara. (2023). *Laporan Kinerja ASN dan Kompetensi Digital*.
Santosa, A. (2021). "Kepemimpinan Strategis dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah." *Jurnal Manajemen Publik Indonesia*, 8(2), 122–134.

- Rachman, H. (2022). "Evaluasi Implementasi Strategi Pembangunan Daerah Berbasis Kinerja." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(1), 55–70.
- Teece, D. J. (2007). "Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance." *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350.